



# BULETIN PARLEMENTARIA

NOMOR 900/IV/III/2016



## BANYAK LAPAS DAN RUTAN KELEBIHAN KAPASITAS



AGAR TIDAK JADI  
POLEMIK, PERLU  
ADA INOVASI  
DITENGAH  
KEMAJUAN  
TEKNOLOGI



BAILOUT  
PERBANKAN  
BENTUK  
KETIDAKADILAN



KOPERASI  
SETJEN DPR  
GELAR RAT



Tim Kunker Komisi III DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi Mulfachri Harahap berdialog di lapas kelas IIA Padang

## Banyak Lapas dan Rutan Kelebihan Kapasitas

Wakil Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Rombongan Tim Kunker Komisi III Mulfachri Harahap menyampaikan bahwa *overcapacity* (kelebihan daya tampung-red) menjadi hal yang banyak dialami oleh Lapas dan Rutan yang ada di Indonesia.

Dari kunjungan-kunjungan kita (Komisi III-red) ke berbagai daerah, permasalahan Lapas dan Rutan sama yakni *overcapacity* (kelebihan kapasitas), dan tentu ini akan menjadi catatan penting Komisi III untuk ditindaklanjuti dalam rapat dengan pemerintah," ungkap Mulfachri di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, Senin (21/3/2016).

Mulfachri sampaikan bahwa solusi untuk permasalahan tersebut yakni perlu adanya pembangunan Lapas dan Rutan yang berbeda untuk masing-masing warga binaan atau tahanan. Seperti adanya rutan untuk

narkoba, teroris, lapas wanita, serta lapas anak.

"Pengelompokan warga binaan atau tahanan perlu dilakukan, seperti tahanan narkoba dan teroris tidak bisa digabung dengan tahanan dengan kasus umum atau biasa," ungkapnya.

Lebih lanjut Mulfachri menyampaikan bahwa hasil dari Kunker yang dilakukan ke Padang ini, akan dibahas dalam rapat di DPR dengan pemerintah.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat Ansaruddin, menjelaskan bahwa

persoalan *overcapacity* di Lapas dan Rutan di Sumbar tidak begitu tinggi. Ini terbukti, *overcapacity* Lapas dan Rutan dan Sumbar hanya 16 persen.

Lebih lanjut, Ansaruddin mengatakan persoalan itu akan segera teratasi apabila Rutan di Anak Aie Padang bisa dioperasikan sepenuhnya, karena kapasitas Rutan Padang bisa menampung 620 warga binaan.

Ansaruddin juga menyebut, untuk mengoperasikan Rutan Anak Aie Padang secara penuh, perlu adanya dana sebesar Rp 18 miliar. Dana itu digunakan untuk pembangunan pagar dan melengkapi fasilitas lainnya, yang saat ini belum memiliki pengamanan yang cukup baik.

"Meski Rutan Padang belum dioperasikan sepenuhnya, saat ini telah ada 40 orang penghuni rutan itu, yang tergabung dari warga binaan dan petugas setempat," kata Ansaruddin.

Setelah melakukan pertemuan dengan Kanwil KemenkumHAM Sumbar, rombongan Komisi III lakukan sidak atau tinjauan ke Lapas Kelas IIA Padang. Dalam sidak tersebut Komisi III berdialog dengan para tahanan menanyakan kasus-kasus yang menimpa mereka.

Para tahanan di Lapas Kelas IIA Padang mengeluhkan terkait dengan PP No 99 Tahun 2012 tentang Pemberian Remisi, sementara Mulfachri tegaskan bahwa PP tersebut merupakan domainnya pemerintah

"Tentunya ada kritikan dan masukan terkait PP tersebut, pasti pemerintah akan lakukan evaluasi serta kajian-kajian yang mendalam mengenai implementasi PP tersebut," jelas Mulfachri.

Politisi PAN ini juga sampaikan bahwa remisi itu hak setiap orang yang sudah memenuhi syarat itu harus di berikan. Lapas dan Rutan saat ini bukan lagi menjadi tempat penghukuman tapi sebagai tempat membina orang.



**PENGAWAS UMUM**

Pimpinan DPR-RI

**PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH**

Dr. Winantuningtyastuti, M.Si  
(Sekretaris Jenderal DPR-RI)

**WAKIL KETUA PENGARAH**

Dra. Damayanti, M.Si,  
(DEPUTI PERSIDANGAN)

**PIMPINAN REDAKSI**

Drs. Suratna, M.Si  
(Kabag Media Cetak & Media Sosial)

**WK. PIMPINAN REDAKSI**

Dra. Tri Hastuti  
(Kasubag Media Cetak)

**REDAKTUR**

Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos

**SEKRETARIS REDAKSI**

Suciati, S.Sos

**ANGGOTA REDAKSI**

Agung Sulistiono, SH,  
Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,  
Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli,  
Devi Iriandi, Hendra Sunandar,  
Surahmat Eko, Ria Nur Mega

**REDAKTUR FOTO**

Eka Hindra, Iwan Armanias

**FOTOGRAFER**

Rizka Arianindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,  
Andi M. Ilham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati,  
Jayadi Maulana, Arief Rachman,  
R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah

**ADMINISTRASI FOTO**

Hasri Mentari

**SIRKULASI**

Bagus Mudjiharjanto

**ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA**

**Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI**

Gedung Nusantara II Lt. 3

Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta

Telp. (021) 5715348, 5715350

Fax. (021) 5715341,

e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com

www.dpr.go.id/berita

**PENERBITAN & DISTRIBUSI**

**PIMPINAN PENERBITAN**

Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP  
(Kabag Penerbitan)

**WK. PIMPINAN PENERBITAN**

Mediantoro, SE  
(Kasubag Produksi),  
Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si  
(Kasubag Distribusi)

**Telp.** 021-571 5697

**Fax.** 021-571 5421

**Email**

penerbitandpr@gmail.com

*(isi berita dan materi foto  
diluar tanggung jawab Bagian Penerbitan)*



## Tak Boleh Ada Dendam Dalam Hambalang

Ketua DPR RI, Ade Komarudin menolak adanya usulan yang merencanakan proyek Hambalang dijadikan museum pengingat antikorupsi

Menurutnya usulan ini mengandung nuansa sentimen pada salah satu golongan, dia mengajurkan tidak boleh ada dendam dalam Hambalang, meskipun dia menyadari ada bahaya laten korupsi, dan menurutnya ada banyak cara untuk mencegah terjadinya korupsi.



Ketua DPR RI Ade Komarudin

"Menurut saya, usulan itu salah, untuk mengingat korupsi ada cara lain. Apakah itu benar mengingat? Apakah itu bukan dendam? Di agama tidak diperbolehkan dendam dengan orang" ungkap Ade di Ruang Press Room, Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/3/2016).

Politisi dari Fraksi Partai Golongan Karya ini, berpendapat bahwa perilaku dendam dan dengki pada seseorang tidak sesuai dengan ajaran agama. Selain itu dia juga mengatakan, mangkraknya proyek Hambalang sebaiknya tidak dibuat menjadi sia-sia atau tidak berguna.

"Janganlah membuat sesuatu mubazir yang tidak disukai agama," seru Akom sapaan akrab Ade Komarudin.

Namun dewan dari dapil Jawa Barat VII ini berpendapat, kelanjutan pembangunan proyek pembangunan yang sebelumnya direncanakan menjadi Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON)

Hambalang ini, adalah kewenangan pemerintah.

Meskipun demikian DPR melalui Komisi X juga berhak memberi persetujuan dan melakukan pengawasan pada proses yang diambil pemerintah. Karena, proyek pembangunan sarana dan prasarana olahraga tersebut menggunakan uang negara.

"Itu telah menggunakan uang negara, daripada mubazir, mangkrak, ya diteruskan saja. Namun keberlanjutannya akan dijadikan apa, itu kewenangan pemerintah, dengan tentunya meminta persetujuan DPR", ungkapnya.

Ade menambahkan, Komisi X bisa melakukan evaluasi soal langkah yang nantinya diambil oleh pemerintah. Termasuk dalam menjalankan fungsi pengawasan. "Tapi sekali lagi itu urusan eksekutif, posisi DPR adalah mengawasi langkah pemerintah untuk menyelesaikan masalah Hambalang tersebut," kata mantan Ketua PB HMI Periode 1993-1998.

(elo,nt) foto:kresno/hr



## Agar Tidak Jadi Polemik, Perlu Ada Inovasi Ditengah Kemajuan Teknologi

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, keberadaan angkutan umum berbasis aplikasi merupakan fenomena baru di tengah kemajuan teknologi, sehingga perlu ada inovasi agar fenomena itu tak berubah menjadi polemik. Hal itu disampaikannya saat ditemui di Ruang Kerjanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, (22/3/2016).

Fahri menuturkan, angkutan umum berbasis aplikasi seperti Uber dan Grab Car selama ini diketahui menjadikan pemilik mobil sekaligus sebagai pengusaha. Langkah itu yang tidak diikuti oleh kelompok angkutan umum tradisional seperti Blue Bird dalam mengelola sistem kepemilikan taksi mereka.

"Ini adalah dunia baru, fenomena yang berkembang dan itu menciptakan lanskap serta *platform* bisnis baru di Indonesia, tidak mungkin kita tinggalkan. Negara harus punya imajinasi untuk melacak efek satu *platform*, terutama yang terkait dengan pelayanan publik atau infrastruktur publik," paparnya.

"Itu adalah *logic system* ekonomi baru berdasarkan teknologi. Cuma, negara harus bisa menjembatani proses transisinya," sambungnya.

Keberadaan angkutan umum berbasis aplikasi, menurut dia, seharusnya didukung dengan perubahan sistem yang ada. Adapun modernisasi sistem yang dimaksud Fahri adalah dengan mengubah paradigma kepemilikan taksi oleh para sopirnya.

"Jangan sampai, mobil yang selama ini dikemudikan para sopir justru hanya dikuasai oleh para pemilik modal. Di negara yang tidak kacau itu kata kuncinya adalah tidak ada monopoli kepemilikan taksi, tetapi semua sopir taksi jadi pemilik taksi," ujar Fahri.

Menurutnya, Pemerintah harus segera melakukan studi dan begitu

aplikasi itu diberi izin beroperasi, kementerian terkait harus tahu konsekuensinya. "Bisnis ini akan dimiliki semua orang, dan siapa saja berhak untuk menjalankan usahanya," tutur Fahri.

Selain itu, Fahri juga menegaskan, negara harus lebih cerdas memantau jangan sampai perkembangan sektor modern mematikan sektor

tradisional. "Blue bird dan kawan-kawan itu sektor tradisional, mereka sudah berbisnis berpuluh-puluh tahun, sekarang tiba-tiba orang dengan aplikasi dia komando semua yang punya mobil jadi pengusaha-pengusaha. Itu *enggak* boleh dimatikan, sebab logis dari ekonomi baru berdasarkan pengetahuan," ujar Politisi Fraksi PKS ini.

Cuma, kata Fahri, negara harusnya bisa menjembatani transisinya, di antaranya modernisasi sistem kepemilikan taksi. "Jangan sampai taksi

dikuasai oleh pemodal besar. Taksi mesti mulai dikuasai setiap orang. Jadi supir taksi itu bisa menjadi pemilik taksi, sehingga bisa daftar ke aplikasi itu, dia bisa menjadi peserta," jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah tak perlu menerbitkan regulasi baru untuk menyelesaikan polemik yang ada. Menurut dia, yang perlu dilakukan justru mempermudah setiap orang agar dapat memiliki bisnisnya masing-masing. Fahri juga berpesan jangan sampai protes yang disampaikan akibat adanya persaingan bisnis justru mematikan usaha orang lain.

(hs.ri) foto: jakse/hr



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah

## Indonesia Dorong Kemerdekaan Palestina Dalam Resolusi IPU ke-134

Dalam pertemuan parlemen kelompok ASEAN+3 dan pertemuan Parlemen Negara Islam dunia, Indonesia mendorong kuat agar isu kemerdekaan Palestina dimasukkan dalam draf resolusi yang akan disahkan dalam Forum Inter Parliamentary Union (IPU) 2016.



## Ketua DPR Tinjau Renovasi Ruang Wartawan Parlemen

**K**etua DPR Ade Komarudin didampingi pimpinan Setjen dan Ketua Pressroom, secara langsung meninjau renovasi pembangunan ruang kerja wartawan parlemen, hal ini guna memastikan fasilitas yang dibutuhkan para wartawan terpenuhi dengan baik.

Dalam tinjauannya ini, Ade sekaligus berkesempatan berdialog dan mendengarkan semua masukan dari wartawan, "segala macam kebutuhan nantinya akan dikoordinasikan secara detail dengan Kesekjenan DPR, pokoknya di sini kami siapkan dengan baik," kata Ade di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/3/2016).

Selanjutnya, Ade yang juga legislator dari dapil Jawa Barat VII, berharap wartawan parlemen diperlakukan secara manusiawi, namun para wartawan juga harus bersedia berlaku rapi, dan menjaga ketertiban kompleks parlemen, salah satunya adalah dengan berpakaian rapi.

"Kalau bisa pakaiannya rapi-rapi, kalau soal kebaikan menurut saya dibuat aturan press room saja," pinta Ade

**H**al ini diungkapkan Ketua Tim Delegasi Indonesia Fadli Zon kepada wartawan di Southern Sun Ridgewai, Lusaka, Zambia, Minggu (20/3/2016).

Fadli Zon menyatakan, Parlemen Indonesia akan membawa hasil dari Pertemuan OKI bulan lalu di Indonesia ke dalam forum IPU. "Kami akan mendorong kuat agar isu kemerdekaan Palestina diadopsi sebagai resolusi yang akan dihasilkan dalam forum IPU ke-134 ini," jelasnya.

Ia menambahkan, IPU merupakan forum parlemen dunia. Forum yang sangat strategis untuk menegaskan posisi Indonesia atas kemerdekaan Palestina.

"Kita dari sisi parlemen, akan memperkuat agenda strategis diplomasi pemerintah dalam forum IPU. Termasuk



Ketua DPR RI Ade Komarudin saat meninjau Renovasi Ruang Wartawan

kepada Koordinator Press Room.

Selain itu, tambahannya, untuk menjaga keamanan di antara para wartawan dan keamanan kompleks parlemen, Akom begitu sapaan akrab Ade, meminta untuk memverifikasi data

wartawan parlemen secara teliti, agar tidak ada oknum yang memanfaatkan kelengahan para wartawan, mengingat kesibukannya dalam meliput berita.

"Makanya tolong diverifikasi yang betul, siapa saja yang terdaftar, ada ID (tanda pengenal) sebagai akses masuk kompleks parlemen," ujar Akom.

Obrolan Akom bersama para wartawan parlemen berlangsung dengan santai dan akrab, bahkan dibarengi sendau gurau, dalam obrolan ini Akom menyampaikan, dia tidak berkenan melihat pemandangan wartawan yang tidak tertib, duduk di bawah tiang sambil makan cemilan ringan lalu setelah itu meninggalkan sampah begitu saja, tidak dibuang pada tempatnya.

Dalam ruangan wartawan yang sedang direnovasi, juga disiapkan perangkat keamanan seperti CCTV, agar aktivitas di dalam ruangan dapat terpantau, sebagai antisipasi dari tindakan yang merugikan orang lain. Selain itu juga disediakan identitas pengenal wartawan, agar tidak sembarang orang bisa keluar masuk ruang wartawan parlemen.



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

agenda kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel yang dihasilkan dalam pertemuan OKI," pungkasnya.

(iwi) foto: iwan/hr

(eko,nt) foto: kresno/hr



## Ketua DPR Ingin Miliki Perpustakaan Parlemen Terbesar se Asia Tenggara

Perpustakaan MPR kembali mengadakan acara peluncuran buku, kali ini sebuah buku berjudul Penguatan Kelembagaan Wujud Sebuah Pengabdian karya Marzuki Alie. Menurut Ketua DPR Ade Komarudin ini adalah sebuah tradisi yang sangat bagus untuk dapat dilanjutkan oleh DPR dan MPR.

**T**erus terang saja, saya bercita-cita kalau dalam tempo sampai tahun 2019, dapat memiliki perpustakaan terbesar se Asia Tenggara yang ada di Parlemen ini. Jadi ini adalah penggabungan antara perpustakaan MPR, DPR dan DPD. Semua jadi satu yakni perpustakaan Parlemen," ujar Akom saat memberikan sambutan peluncuran buku tersebut di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/3).

Sementara itu, Mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie juga berharap Lembaga DPR saat ini harus jauh lebih baik dari era yang sebelumnya, karena lembaga-lembaga demokrasi yang tumbuh dan berkembang sesuai amanat konstitusi harus disiapkan dengan baik, didalam rangka menunjang kinerja anggota Dewan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

"Dengan diberikan kewenangan yang lebih besar kepada lembaga DPR, yang diemban oleh anggota-anggotanya, tentu perlu adanya penguatan kelembagaan agar kinerja Dewan ini bisa dinilai baik sebagaimana yang diharapkan. Bila sebuah kewenangan seorang anggota Dewan yang besar tapi tidak ditunjang oleh penguatan kelembagaannya, maka yang terjadi dan muncul kepermukaan hanya karakter perorangan, sikap dan tingkah laku yang tidak menyenangkan bagi masyarakat. Dan harapan yang demikian besar dari masyarakat kepada Dewan ternyata tidak mampu



Ketua DPR RI Ade Komarudin dan Mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie

terpenuhi," papar Marzuki.

Mimpi Marzuki pada saat dia memimpin Lembaga DPR pada periode yang lalu, agar DPR dapat menjadi lembaga yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itulah dia melakukan pengkajian tentang keberadaan posisi DPR pada saat itu dari sudut pandang publik.

"Seorang Pimpinan DPR bukanlah seorang *chairman*, yang bisa memerintah anak buahnya. Tapi hanya sebagai seorang *speakers* atau juru bicara yang mengkoordinasikan semua aktifitas kegiatan di kedewanan ini, jadi secara substansi saya tidak mungkin melakukan perubahan kepada anggota Dewan, tapi ada sisi lain yaitu dari sisi Kesetjengan. Dimana Setjen bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan," ujarnya.

Marzuki menghimbau kepada Partai Politik agar memberikan pendidikan politik kepada kadernya. Tanggungjawab partai politik manakala partai tersebut mengirimkan kadernya ke Lembaga Legislatif. Pesan Marzuki kepada Akom yang hadir dalam acara itu, bila nanti dipilih dan dipercaya sebagai Ketua salah satu Partai, agar

kadernya yang ditempatkan di DPR, haruslah orang-orang yang bisa dipercaya sebagai negarawan untuk memimpin lembaga tinggi negara itu.

(dep.mp), foto : eno/hr

**K**etua DPR RI Ade Komarudin didampingi para Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto, Taufik Kurniawan, dan Fahri Hamzah melantik Alfia Reziani Politisi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Pelantikan ini merupakan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR masa jabatan tahun 2014-2019, Alfia sebagai substitusi dari Puan Maharani yang saat ini tengah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (PMK).

Pembacaan sumpah janji pelantikan dipandu oleh Ade Komarudin, PAW ini merupakan



## Fadli Apresiasi Pemerintah Kuwait



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

Fadli sebagai Presiden GOPAC mengapresiasi Pemerintah Kuwait kepada GOPAC. Ketua Parlemen Kuwait, menyatakan bahwa pemerintah Kuwait berkomitmen kuat dalam pemberantasan korupsi. Bentuk komitmen ini diwujudkan berupa dukungan dari Raja Kuwait kepada GOPAC.

Demikian mengemuka dalam

(21/3'2016).

Fadli Zon yang sekaligus Ketua Delegasi DPR RI melakukan pertemuan tersebut menindaklanjuti dukungan Pemerintah Kuwait pada *Global Organization of Parliamentarians Against Corruption* (GOPAC) sebagai organisasi internasional yang fokus pada pemberantasan korupsi.

"Semakin banyak negara yang

pertemuan *bilateral meetings* dengan Ketua Parlemen Kuwait, Marzouq Al Ghanin di sela-sela Sidang IPU ke-134 di r u a n g Luapula, Lusaka, Zambia, S e n i n

memberikan dukungan dan apresiasi GOPAC, menandakan komitmen mereka terhadap pemberantasan korupsi. Sebagai negara yang kini memimpin GOPAC, Indonesia berperan mengajak sebanyak mungkin parlemen dunia ikut mendukung pemberantasan korupsi," ujar Fadli Zon.

Ia menambahkan, Ketua Parlemen Kuwait juga meminta dukungan Indonesia dalam kemerdekaan Palestina. Sebagai negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia, Kuwait mengharapkan peran aktif Indonesia dalam forum-forum internasional untuk mendukung agenda kemerdekaan Palestina.

Fadli Zon menegaskan, bahwa sikap dan posisi Indonesia tegas dalam mendukung kemerdekaan Palestina. "Indonesia akan selalu mendorong dan menyuarakan agenda kemerdekaan Palestina dalam setiap forum internasional, termasuk juga di dalam Sidang Inter Parliamentary Union (IPU) ke-134 yang berlangsung di Lusaka, Zambia," pungkasnya.

(tw) foto : iwan/hr

## Akhir Masa Sidang III, Pimpinan DPR Lantik Anggota PAW



Suasana Pelantikan PAW Anggota DPR RI

agenda pertama dari Rapat Paripurna DPR pada penutupan masa sidang III 2015-2016, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/3/2016).

Sebagai pengganti Puan, Alfia mendapat nomor anggota 175, dia merupakan pemilik suara terbesar keempat dari daerah pemilihan

Jawa Tengah V, dapil ini sama dengan Puan.

Dengan pelantikan ini Puan Maharani resmi digantikan oleh Alfia Reziani, hal ini sesuai dengan Keppres No. 8/P Tahun 2016 tertanggal 12 Januari 2016.

Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan mengucapkan selamat dan mengharapkan dengan bergabungnya Alfia Reziani bisa memperkuat tugas konstitusional DPR.

"Kita semua, seluruh pimpinan dan anggota dewan mengucapkan selamat atas anggota yang baru saja dilantik, semoga dengan bergabungnya saudara, akan lebih memperkuat pelaksanaan tugas konstitusional dewan," ujar Taufik.

(eko,nt) foto : tim/hr



## DPR Dorong Peran Aktif Pemuda Dalam Demokrasi

Wakil Ketua DPR RI / Korpolkam Fadli Zon mendorong agar peran aktif pemuda dalam demokrasi bisa ditingkatkan. Hal itu dikarenakan perkembangan demokrasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran pemuda. Baik itu yang dimulai dari proses awal kemerdekaan hingga sekarang.

Hal itu disampaikan saat pidato dalam Sidang Parlemen Dunia 134rd Inter Parliamentary Union (IPU) Assembly and Related Meetings di Gedung Mulungushi International Conference Centre, Lusaka, Zambia pada Minggu (20/3).

"Dalam konteks peran pemuda dan demokrasi, sejarah demokrasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran pemuda. Mulai dari proses awal kemerdekaan hingga saat ini, pemuda merupakan aktor penting dalam sejarah Indonesia.

Tak hanya itu, lulusan London School of Economics and Political Science (LSE) Inggris itu juga menyampaikan bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. "Indonesia mengalami perkembangan demokrasi yang cukup signifikan. Hal ini ditandai oleh beberapa hal seperti terjaminnya kebebasan berekspresi, Pemilu yang terselenggara secara berkala, serta terpilihnya presiden dan anggota parlemen melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat," jelasnya.

Fadli juga menjelaskan bahwa Indonesia yang memiliki heterogenitas yang cukup besar namun tetap bisa menghargai perbedaan dan juga mampu memadukan antara Islam dan demokrasi meskipun Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia.

"Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia terdiri dari 13.466 pulau, ratusan bahasa serta etnik

dan memiliki penduduk dengan jumlah muslim terbesar di dunia. Ini adalah bukti nyata bahwa Islam dan demokrasi dapat tumbuh bersama di Indonesia, we are united in diversity," tuturnya.

Meskipun demikian, jelas Fadli, demokrasi tidak hanya dimaknai berdasarkan parameter tersebut. Demokrasi juga bukan sistem politik yang one size fits all. Demokrasi memiliki prinsip-prinsip universal, namun juga harus didasari oleh nilai dan budaya setempat.

Oleh karena itu, jelasnya, Indonesia merumuskan satu sistem demokrasinya sendiri, yang dinamakan dengan Demokrasi Pancasila. "Yakni satu bentuk gagasan demokrasi yang berdasarkan pada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan mufakat, serta keadilan sosial," jelasnya.

Melihat fakta tersebut, Fadli menuturkan bahwa Indonesia termasuk negara yang mendorong agar pemudanya mampu mengambil peran yang besar di alam demokrasi. Misalnya, di Indonesia dalam UU Pemilu berlaku aturan syarat usia minimum 21 tahun sebagai calon anggota parlemen dan di dalam UU Pilkada berlaku syarat usia minimum 25 tahun untuk menjadi walikota serta 30 tahun untuk menjadi gubernur.

Fadli menegaskan bahwa ini adalah bukti Indonesia menempatkan pemuda sebagai kelompok yang kreatif dan menjadi fondasi kuat untuk menaruh harapan bagi masa depan bangsa. "Indonesia melihat bahwa pemuda merupakan kelompok yang kreatif, agent of change, dan masa depan sebuah bangsa," ujar Fadli yang berasal dari dapil Jawa Barat V ini.

Oleh karena itu, dalam kesempatan tersebut Fadli Zon mengajak kepada semua anggota parlemen yang hadir dalam Sidang IPU tersebut untuk mendorong kebijakan-kebijakan yang kondusif agar pemuda dapat lebih aktif lagi di alam demokrasi.

"Saya percaya bahwa kita butuh upaya yang lebih keras untuk memberdayakan



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

pemuda, agar demokrasi dapat berjalan dengan lebih segar dan lebih cepat dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan, masa depan semua bangsa sangat ditentukan oleh peran aktif pemudanya dalam demokrasi," pungkasnya.

(iwi/hs) foto: iwan/hr



## Bailout Perbankan Bentuk Ketidakadilan

Penanganan krisis perbankan dengan sistem *bailout* merupakan bentuk ketidakadilan. Uang negara habis terkuras untuk menalangi bank-bank bermasalah. Itu adalah pengalaman masa lalu. Kini, sudah ada UU Pencegahan dan Penanggulangan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) yang baru saja disahkan DPR. UU ini menegaskan penanganan krisis harus melalui *bailin*.

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menyatakan hal tersebut usai memimpin Rapat Paripurna DPR, Kamis (17/3). "Sekarang prinsip UU PPKSK tidak ada lagi istilah *bailout*, tapi *bailin*. Kalau *bailout* dulu ditalangi negara. Sekarang, kalau perbankan *car*-nya tidak memenuhi syarat, dana diambil dari pemilik modal. Tidak ada kejadian lagi seperti masa lalu."

UU ini sekaligus menjadi protokol krisis yang memberi solusi saat krisis



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan

perbankan terjadi. Para pemilik modal perbankan harus bertanggung jawab bila banknya mengalami krisis. Uang rakyat

dalam APBN tak boleh digunakan untuk keperluan menalangi bank gagal. "Harapannya, ini menjadi protokol krisis. Jadi kalau ada krisis, pasti tidak merugikan uang rakyat. Tapi, kembali ke pemilik modal," ungkap politisi PAN itu.

Ditambahkan Taufik, UU PPKSK adalah UU prioritas yang dibutuhkan masyarakat dalam menghadapi krisis global. UU ini sudah mengalami pembahasan yang sangat panjang dan alot. Bahkan, pada periode DPR lalu, UU ini gagal disahkan. Dulu banyak kepentingan para pemilik modal yang tak menyetujui lahirnya UU tersebut.

"Alhamdulillah kita bersyukur, sekarang kalau terjadi krisis ekonomi atau terjadi penarikan dana besar-besaran oleh masyarakat di suatu bank, sehingga membuat bank itu kolaps, kita sudah memiliki payung hukumnya," ujar Taufik kepada pers.

(mh) foto: ritka/hr

## DPR Dukung Nota Protes Indonesia ke Tiongkok



Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq dalam rilisnya mendukung nota protes pemerintah Indonesia melalu Menlu kepada Pemerintah Tiongkok dalam kasus pelanggaran wilayah perairan Indonesia oleh kapal nelayan dan armada coastguard Tiongkok.

"Kasus ini merupakan pelanggaran serius, pihak Tiongkok semestinya menjaga trust building dengan Indonesia," kata Mahfudz dalam siaran pers yang

siaran pers yang

diterima Parleментарia, Selasa, (22/3/2016).

Lebih lanjut, Mahfudz menegaskan, insiden pelanggaran ini bisa menggoyahkan pondasi bangunan kepercayaan kedua negara yang sedang dibangun.

"Pemerintah Tiongkok harus sungguh-sungguh merespon nota protes Indonesia ini, jika tidak, maka Tiongkok akan bisa kehilangan teman dalam peran-peran yang sedang dikembangkannya dikawasan ini,"pungkasnya.

Nota protes ini terkait masuknya kapal penangkap ikan KM Kway Fey 10078 dan kapal coastguard atau keamanan laut milik negara itu ke kawasan perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada Sabtu (19/3/2016) lalu.

(nt) foto: andri/hr



## Komisi VIII Apresiasi Penanganan Banjir Bojonegoro

Anggota Komisi VIII DPR RI, Kuswiyanto mengapresiasi penanganan bencana banjir yang dilakukan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

"Wilayah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur yang dilewati aliran air bendungan solo menjadi salah satu daerah yang hampir setiap tahun terkena bencana banjir. Namun atas kerjasama semua pihak, BNPB, BPBD, Pemkab dan masyarakat Bojonegoro, bencana banjir kini tidak lagi menjadi momok yang menakutkan. Bahkan menurut penjelasan dari BNPB, kini masyarakat sekitar sudah merubah paradigma dari menanggulangi banjir menjadi menggauli banjir," jelas Kuswiyanto, begitu ia biasa disapa.



Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Bojonegoro

Ditambahkan Kus, istilah menggauli banjir muncul karena memang masyarakat sekitar tidak bisa melawan bencana tersebut. Pilihan yang paling bijak adalah berkawan dengan bencana. Dalam hal ini tentu ada cara-cara yang dilakukan agar bencana tidak menimbulkan banyak korban baik harta dan jiwa. Diantaranya dengan penutupan *doorlaet* atau tanggul-tanggul

yang dapat menghambat atau mengurangi air. Selain itu, pembangunan bendungan juga menjadi salah satu cara dalam menggauli bencana banjir

Kus yang ikut didampingi anggota Komisi VIII lainnya seperti Desy Ratnasari, An'im F. Mahrus, dan Hamka Ha, Selasa (22/3) menyerahkan bantuan dana dari BNPB yang diterima oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono untuk digunakan dalam penanganan bencana di kabupaten tersebut.

Usai pemberian bantuan Komisi VIII juga meninjau salah satu bendungan yang digunakan dalam penanganan banjir, yakni bendungan di Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro Jatim. Konon, bendungan yang ikut dibangun oleh BNPB ini juga bermanfaat sebagai penghubung dua desa, yakni Desa Mori Padang Kecamatan Truco dan Desa Ringinrejo Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro Jatim.

(eko.nt) foto:kresno/hr.

## Koperasi Setjen DPR Gelar RAT

Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR-RI menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang kali ini mengambil tema "Membangun Koperasi Mandiri Melalui Partisipasi Aktif Anggota," di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/3/2016). Deputi Bidang Administrasi



Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI Achmad Djuned

Setjen DPR RI, Achmad Djuned yang bertugas mewakili Pembina Koperasi Sekjen DPR Winantuningtyastiti Swasanani, memberi sambutan sekaligus membuka acara RAT.

Dalam sambutannya, Achmad Djuned menyampaikan, bahwa koperasi merupakan lembaga tempat berhimpun para aparatur negara yang memiliki kebutuhan dan kepentingan yang homogen, namun inti dari keberagaman itu adalah untuk kesejahteraan bersama. "Berhimpun untuk meningkatkan kesejahteraan," ungkapnya.

Achmad juga mengatakan kopreasi adalah badan usaha yang strategis bagi anggotanya dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomis yang berdampak pada masyarakat yang lebih luas.

Sementara itu, dalam rapat ini Ketua Koperasi Mohammad Djazuli selaku Pengurus Koperasi Pegawai Setjen DPR

membacakan laporan pertanggung-jawaban.

Djazuli menyampaikan pada tahun kedua periode kepengurusan ini, memfokuskan pada tahap peningkatan pelayanan, revitalisasi unit usaha, dan konsolidasi organisasi dengan tetap memperhatikan pertumbuhan kinerja usaha.

"Kami sangat mengharapkan agar upaya kita bersama dalam membangun koperasi yang maju dan sehat ini akan berhasil sesuai harapan," ujar Djazuli.

Dia mengharapkan koperasi bukan hanya tumbuh pesat dalam skala persaingan usaha saja, namun juga memiliki tata kelola yang baik, struktur pemodalan yang sehat dan proporsional serta dapat menjadi contoh model pengelolaan koperasi yang patuh terhadap segala ketentuan perundangan.

(eko.nt) foto:kresno/hr.



## Pemerintah Diminta Naikkan Harga Komoditas Karet dan Sawit

**K**omisi IV prihatin dengan merosotnya harga komoditas karet dan sawit. Pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan diminta untuk berupaya optimal dalam menaikkan harga karet dan sawit.

"Kami minta pemerintah mengupayakan agar harga karet bisa naik, atau setidaknya melakukan negosiasi dengan internasional supaya harga karet Indonesia bisa naik, atau menjual ke negara-negara ketiga," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Ibnu Multazam, di lokasi kebun program revialisasi perkebunan non mitra komoditi karet Kelompok Mekar Sari dan Karya Mandiri Desa Bukit Tempurung Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Minggu (20/3/2016).

Ibnu Multazam menambahkan, dalam dialog di Perkebunan Karet Rakyat terungkap, petani merasa keberatan karena harga karet yang merosot, sedangkan mereka juga harus membayar utang, karena untuk penanaman karet ini berdasarkan utang dari BRI dengan masa tempo dibayarkan setelah 6 tahun.

"Sekarang sudah waktunya

mengangsur. Untuk rata-rata memangsur Rp.1,6 juta per bulan, sedangkan penghasilan harga karet saat ini sedang turun drastis," jelasnya.

Menurut Ibnu, Menteri Perdagangan yang harus bertanggungjawab ketika harga karet drop termasuk harga sawit dan harga komoditas lainnya.

"Komisi IV ingin agar Kementerian Perdagangan melakukan upaya-upaya untuk membela penghasilan masyarakat Indonesia dalam negeri," tegasnya.

Lebih lanjut, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengusulkan kepada Kementerian Pertanian ada program integrasi ternak sawit atau karet, dimaksudkan agar ada penghasilan tambahan untuk pekebun sawit dan karet.

Selain itu, Ibnu menghimbau agar petani karet tidak menjual sendiri-sendiri kepada tengkulak sehingga harga dipermainkan oleh tengkulak.

"Bisa dibuat infrastruktur kelembaga-



Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI saat meninjau Perkebunan Karet.

annya agar mereka bersatu sehingga penjualan getah karet ini melalui kelembagaan masyarakat, maka tidak terjadi kompetisi yang tidak sehat. Kasihan petani harus bertarung sendiri ketika harga karet turun," tandasnya.

Hal ini akan ditindaklanjuti dalam rapat kerja dengan pemerintah. Selain itu Komisi IV juga mengapresiasi kinerja Kementerian Pertanian yang telah meningkatkan hasil produksi karet dan sawit di Provinsi Jambi, tinggal harga karet dan sawit yang turun drastis akan menjadi perhatian bersama.

(as.nf) foto : agung/hr.

## Yankes Setjen DPR Gelar Acara Penyuluhan Kesehatan

**D**alam rangka meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan alat reproduksi wanita, Unit Pelayanan Kesehatan (YanKes) menyelenggarakan acara penyuluhan kesehatan bagi para karyawan dilingkungan Setjen DPR, yang diadakan di ruang rapat Pansus, Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (22/3/2016).

Yang terlibat selaku pembicara pada acara tersebut adalah Dr. May Rabiulyati dan Dr. Irenne Chris, SpOG. Karena tergerak ingin berbuat sesuatu yang baik, maka Dr. May dan rekan-rekan di Yankes berupaya



Suasana acara Yankes Setjen DPR RI

untuk mengadakan acara penyuluhan tersebut.

"Saya bersama rekan-rekan di Yankes

ingin berbuat sesuatu untuk kepentingan orang banyak, karena kalau kita hanya menunggu pasien datang, itu lebih banyak waktu yang dikeluarkan. Oleh karena itu kita berharap dengan adanya penyuluhan kesehatan ini, penyakit yang mungkin akan timbul, nantinya bisa dicegah," kata May menjelaskan.

Selain itu menurutnya, Setjen DPR juga sangat mendukung terselenggaranya acara ini, yakni dengan turut serta memfasilitasi, agar acara penyuluhan kesehatan ini dapat berlangsung sesuai rencana.

Antusiasme peserta acara yang terdiri dari para wanita PNS dan tenaga honorer itu, juga terlihat dalam sesi tanya jawab dengan para pembicara, yang menanyakan tentang masalah seputar kesehatan alat reproduksi wanita.

(dep.nt) foto : arief/hr.



## Komisi III DPR Akan Bahas RUU Jabatan Hakim

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan usai masa reses sidang ini berakhir, DPR akan melakukan proses pembahasan RUU Jabatan Hakim.

"RUU Jabatan Hakim merupakan RUU inisiatif DPR yang diajukan Komisi III didalam Prolegnas Prioritas 2016, maka nanti setelah reses masa sidang ini selesai, akan segera melakukan proses harmonisasi dan pembulatan di Baleg, selanjutnya dibawa ke Paripurna untuk disetujui dan dibahas di tingkat I bersama pemerintah," jelas Arsul saat tim Kunker Komisi III DPR berdialog dengan jajaran pimpinan pengadilan tinggi, di Palu, Senin (21/3/2016).

Arsul menambahkan, didalam RUU ini ada tiga isu penting yang pertama terkait manajemen jabatan hakim mulai dari proses rekrutmen, syarat-syarat menjadi hakim, kemudian pendidikannya setelah menjadi hakim dilakukan proses promosi dan mutasi yang transparan berbasis transparansi dan akuntabilitas seperti yang ada di prinsip-prinsip yang diletakkan di undang-undang aparatur sipil negara sampai urusan pensiun.

Kedua yang menjadi isinya nanti, undang-undang jabatan hakim nantinya terkait status profesi hakim itu sendiri



Suasana rapat kerja Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI

apakah nanti akan diresmikan hakim itu seluruhnya tingkat pertama sampai hakim agung menjadi pejabat negara atau mungkin juga nanti ada nomenklatur yang lain misalnya aparatur yudisial.

"Ketiga pengawas hakim bagaimana kita mengatur lebih baik pengawasan hakim, mana yang menjadi menjadi porsi Makamah Agung dan mana yang menjadi porsi Komisi Yudisial, harus kita atur lebih baik selama ini tidak ada keterpaduan soal pengawasan antara Makamah Agung dan Komisi Yudisial," jelas Arsul politis dari F-PPP ini.

Dalam kesempatan ini, dirinya berharap, setelah pengesahan UU ini tentunya akan memberikan dasar

peraturan perundang-undangan yang objektif, baik untuk hakim itu sendiri, sehingga hakim bisa nyaman dalam menjalankan tugas dan kewajiban konstitusionalnya yaitu memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara secara adil dan memenuhi keadilan masyarakat dan juga memenuhi unsur kepastian hukum.

Hal yang sama diungkapkan oleh Ketua Tim Rombongan Kunker Komisi III Supratman Andi Agtas, menurutnya, RUU Jabatan Hakim ini sudah masuk Prolegnas Prioritas di tahun 2016, "Jadi kita berharap insya Allah teman di Komisi III setelah selesai harmonisasi bersepakat untuk melakukan tugas legislasi ini di tahun 2016, mudah-mudahan RUU Jabatan Hakim ini di tahun 2016 sudah bisa di sahkan," harap Supratman.

RUU Jabatan Hakim, lanjut Supratman, diharapkan diterima dengan baik oleh pihak pengadilan tinggi negeri dan pengadilan tinggi agama, "RUU Jabatan Hakim ini penting untuk kejelasan status, fasilitas, dan keamanan," tegasnya.

(rmi.net) foto : runi/hr.

## Sudah Saatnya Bengkulu Memiliki Jalur Lingkar Luar

Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Wudiana Adia mengemukakan, sudah saatnya Provinsi Bengkulu memiliki jalur lingkar luar Nakao - Airsebakul yang memisahkan antara lalu lintas penerus dan lalu lintas lokal dengan dibangunnya *elevated road* (jalan layang).

"Kita melihat pembangunan infrastruktur ini menjadi sangat penting buat Bengkulu, apalagi terputusnya jalan lingkar luar ini sudah cukup lama," jelas Yudi saat dirinya bersama Tim Kunker Komisi V DPR meninjau lokasi

yang akan dibangun *elevated road* di Kecamatan Bangka Hulu, Bengkulu, Selasa (22/3/2016).

Yudi menambahkan, permasalahan pembangunan ini ternyata ada pada instansi terkait, dalam hal ini Badan Lingkungan Kota Bengkulu, dimana menurut mereka (Badan Lingkungan-red), mengkhawatirkan jika dibangun *elevated road*, nantinya akan merusak resapan air didaerah itu.

"Menurut saya, dengan konsep pembangunan *elevated road* tidak akan merusak resapan air karena dibangun

dengan tiang pancang, lewat atasnya. Saat ini Kementerian PUPR sedang mengurus proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sehingga nantinya pihak Kementerian LHK bisa memberikan izin pinjam pakai," jelas politis F-PPKS ini.

Sedangkan, Anggota Komisi V DPR Fauzih H Amro menilai, belum terwujudnya pembangunan jalur lingkar luar ini lebih kepada kurangnya koordinasi antar pihak terkait.

"Saya baru tahu ada masalah seperti ini, selama ini Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional tidak memberitahukan hal ini kepada Komisi V DPR," ungkap politisi F-Hanura ini.

Ditambahkannya, untuk membangun *elevated road*, yang paling penting tidak mengganggu kawasan sumber resapan



## Komisi X DPR Dorong Pariwisata Bengkulu

**W** Provinsi Bengkulu yang mempunyai sumberdaya wisata alam, sejarah dan budaya ternyata berada pada kondisi yang memprihatinkan. Ini terungkap pada pertemuan tim Kunker komisi X DPRI RI dipimpin Sutan Adil Hendra dengan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti beserta jajarannya di Ruang Rafflesia, Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (21/3/2016).

"Kami akan terus mendorong pembangunan pariwisata di Bengkulu, namun peran Pemda disini juga harus cerdas dan mampu menjemput serta memberikan informasi tentang destinasi unggulannya," terang Sutan, saat Tim Kunker Komisi X DPR melakukan pertemuan dengan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti beserta jajarannya, di Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (21/3/2016).

Lebih lanjut, jelas Sutan, DPR dengan anggarannya pada tahun 2015 telah menyediakan dana untuk Kemenpar sebesar Rp. 2,5 triliun secara nasional dan di tahun ini lebih 100 persen telah dinaikan sebesar Rp, 5,4 triliun.

Dijelaskan Politisi Gerindra ini, jika langkah tersebut dilakukan Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan baik, tentunya



Ketua Tim Kunker Komisi X DPR RI Sutan Adil menerima cenderamata dari Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti

diharapkan target tingkat kunjungan wisatawan datang ke Indonesia dan ke Bengkulu bisa tercapai.

"Jika melihat jarak antara Bengkulu dengan Jakarta melalui jalur udara juga sangat dekat, yaitu tidak lebih dari 1 jam. Begitu juga dengan Singapura, apabila Pemerintah Provinsi Bengkulu bisa membuka jalur penerbangan baru ke

Negara itu, bukan tidak mungkin, Bengkulu akan bisa berkembang pesat yang ditandai banyaknya tingkat kunjungan wisatawan yang datang sekedar berwisata," tandasnya.

Menurut anggota Tim Komisi X Dapil Yogyakarta Esti Wijayati (F-PDIP) mengaku prihatin dengan kondisi pariwisata Bengkulu, "Terus terang tidak terasa bahwa Bengkulu ini ada di peta pariwisata Indonesia. Sama sekali tidak ada promosi atau festival yang besar gaungnya, tentu saja wisatawan yang datang sangat sedikit. Ini memprihatinkan," tegasnya.

Sementara itu, dalam penjelasannya di hadapan Tim Kunker Komisi X DPR, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti menjelaskan bahwa banyak potensi yang masih bisa dikembangkan namun masih sebatas wacana dikarenakan terhambatnya pendanaan

"Dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada di Provinsi Bengkulu ini, maka kami kesulitan dalam pengembangan potensi wisata, begitu juga dengan sarana pendidikan, sarana kesehatan serta aliran listrik yang belum sampai menjangkau ke desa-desa," pungkasnya.

(rayant) foto : ray/hr



Tim Kunker Komisi V DPR RI berdialog tentang rencana pembangunan Jalur Lingkar Luar Bengkulu

air. Menurutnya, jika ini bisa tertata dengan baik, tidak ada masalah dibangun jalan layang kurang lebih 600 meter dengan anggaran 50 milyar.

"Kita di Komisi V DPR wajib membantu anggarannya karena sudah menjadi kebutuhan masyarakat, dan yang paling penting AMDAL harus selesai lebih dahulu, baru kita bangun. Kita akan gelontorkan anggaran di APBN-P nanti," tekannya.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJJN) III, Thomas Setiabudi mengatakan, hanya Provinsi Bengkulu ini belum memiliki jalur lingkar luar, sedangkan provinsi terdekat sudah ada.

"Buat kami ini adalah kepentingan pengembangan jaringan jalan kita. Kita ingin disetiap Ibukota Provinsi ada jalan yang memisahkan lalu lintas penerus dan lalu lintas lokal," jelasnya.

Menurut Thomas, jika jalan layang ini dibangun, akan memangkas jarak tempuh, dari 22 km menjadi 6 km. "Dengan kunjungan anggota dewan ini, kita berharap kepada Komisi V memperjuangkan anggarannya di APBN-P," harapnya.

Selain meninjau jalan layang, Komisi V DPR juga mengunjungi Pantai Maras yang mengalami abrasi dan belum dilaksanakan penanganan sepanjang 4,2 km dengan perkiraan dana yang dibutuhkan sebesar 167 milyar.

(ik-ant) foto: jakarta/hr



## Kaukus Ekonomi Hijau DPR Dukung *Earth Hour*

**K**aukus Ekonomi Hijau DPR RI mendukung kampanye global dalam gerakan *switch off* atau yang dikenal dengan *Earth Hour* pada Sabtu, 19 Maret 2016 kemarin. Gerakan *Earth Hour* yang berlangsung hanya satu jam mulai pukul 20.30 sampai pukul 21.30 tersebut mengajak masyarakat luas untuk turut andil dalam pemadaman lampu atau alat-alat listrik yang ada di rumah tangga.

Seperti dikatakan oleh Ketua Kaukus Ekonomi Hijau DPR RI Satya Widya Yudha, aksi *Earth Hour* merupakan bentuk tanggung jawab kita sebagai masyarakat saat ini dalam mendukung gerakan perubahan iklim global.

"Semoga dengan aksi *Earth Hour* ini, masyarakat menjadi sadar akan pentingnya energi bagi kehidupan umat manusia di dunia. Meskipun hanya satu jam, tapi dampaknya akan luar biasa jika ini dilakukan oleh semua elemen masyarakat kita," papar Satya dalam rilis yang disampaikannya kepada Parlemen, Senin (22/3/2016).

Satya menambahkan, seluruh Anggota Kaukus Ekonomi Hijau DPR yang terdiri dari sejumlah anggota parlemen dari lintas komisi dan lintas fraksi tersebut juga turut aktif untuk mendukung kampanye *Earth Hour* di dapil-nya masing-masing.

Dia mengharapkan, gerakan ini nantinya akan semakin luas dan melibatkan seluruh elemen masyarakat baik di kota maupun di pedesaan. Selama satu jam, anggota-anggota Kaukus Ekonomi Hijau DPR di berbagai lokasi terlibat dalam acara ini, baik yang ada di Rumah Jabatan Anggota (RJA) di Kalibata maupun di rumah kediaman pribadi di daerah Bintaro serta di lokasi lainnya.

"Dengan terlibatnya Kaukus Ekonomi Hijau DPR yang diikuti oleh sejumlah anggota parlemen kita dalam kampanye *Earth Hour*, kedepan gerakan matikan lampu sejam ini bisa menjadi gaya hidup

bagi masyarakat. Inilah bentuk tanggung jawab kita untuk mengurangi beban energi dan juga mendukung penyelamatan perubahan iklim yang akan menjadi ancaman serius di masa mendatang," jelas Satya yang juga anggota Komisi VII DPR RI.

Kaukus Ekonomi Hijau DPR dalam kiprahnya juga turut serta aktif berpartisipasi dalam konferensi-konferensi perubahan iklim internasional, terakhir mengikuti COP21 di Paris, Perancis akhir tahun lalu. Satya menyebutkan, selain itu Kaukus Ekonomi Hijau DPR juga bekerjasama dengan UNORCID melaksanakan kegiatan yang melibatkan langsung anggota dewan maupun para tenaga ahli di DPR.

Anggota Dewan dari Fraksi Partai Golongan Karya ini mencontohkan, pelaksanaan kegiatan training serta diskusi publik dengan menghadirkan narasumber-narasumber ahli di bidang lingkungan, diantaranya Maria van der Hoeven - IEA Executive Director, Sarwono Kusumaatmadja, Ketua Dewan Pengarah Penanganan

Perubahan Iklim serta Prof. Dr. Rizaldi Boer CCROM-SEAP IPB.

"Baru-baru ini, Kaukus Ekonomi Hijau DPR mengundang Pavan Sukdev, UNEP Goodwill Ambassador dan Andrew Mitchel, Global Canopy Program untuk berdiskusi dengan anggota kaukus pada 17 Maret 2016 kemarin di DPR RI. Kita tahu, Pavan Sukhdev merupakan pakar dunia di bidang Ekonomi Hijau berbagi gagasan kepada Anggota DPR agar merubah pola konsumsi sumber daya kita dari *resource intensive models* menjadi *resource efficiency*," jelas Satya Widya Yudha.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Kaukus Ekonomi Hijau DPR dari Fraksi Gerindra Aryo Djojohadikusumo menambahkan arti pentingnya insentif dalam pengembangan energi alternatif di Indonesia di masa mendatang. "Kita harus berpikir jauh ke depan, bahwa energi alternatif harus menjadi penopang pertumbuhan ekonomi kita," papar Aryo.



Anggota Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha

## Selamat Jalan, Farida Ardans

Innalillahi waiinnailahi rojiun, seluruh jajaran Pimpinan dan Anggota DPR RI beserta Sekretariat Jenderal DPR RI mengucapkan duka cita yang mendalam atas wafatnya Adji Farida Padmo Ardans (A-447), anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Demokrat.

Anggota DPR yang berasal dari dapil Kalimantan Timur ini menghembuskan nafas terakhir pada Selasa, (22/03) pukul 02.00 WIB di rumah duka Jalan

Kenanga Nomor 2A RT 05/RW 02, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Legislator yang dilahirkan di Tenggara pada 1 Oktober 1939 ini meninggalkan dua orang anak yakni Ferucha Arietna dan Andere Fahlevi. Dalam jenjang pendidikan, Farida menyelesaikan studi S1 di Universitas Mulawarman dan Doktor Honoris Causa dari Western University, Amerika



# Pemadaman Listrik Jadi Kendala Penyelenggaraan UNBK di Sorong

**P**ermasalahan utama dari penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat adalah pemadaman listrik. Padahal, dari sisi peralatan penunjang pelaksanaan UNBK, sudah dirasa cukup lengkap.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Kharis, saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR ke SMK Negeri 1 Sorong dan SMA Negeri 3 Sorong, Papua Barat, Senin (21/3/2016).

"Di dua lokasi yang kita tinjau itu, problem utama mereka kalau listrik padam. Padahal seluruh peralatan sudah siap semuanya 100 persen, tinggal menunggu pelaksanaan. Ada kekhawatiran, kalau PLN tidak bisa menjamin pasokan listrik pada saat UNBK berlangsung," kata Kharis.

Untuk itu, tambah politisi F-PKS itu, pihaknya mendorong agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan kesepakatan atau MoU dengan Menteri BUMN atau Dirut PLN langsung, agar ada jaminan daerah-daerah atau lokasi menyelenggarakan UNBK mendapat pasokan listrik, dan tidak ada pemadaman listrik.

"Kami mendapat informasi dari pejabat Eselon 1 Kemendikbud yang ikut

rombongan kunker ini, sudah berkomunikasi dengan Mendikbud, dan dikatakan Mendikbud sudah berkoordinasi dengan Menteri BUMN, dan Menteri BUMN menyanggupi untuk memberikan



Tim Kunker Komisi X DPR RI meninjau SMK N 1 Sorong

garansi bahwa PLN di tempat-tempat UNBK, tidak akan ada pemadaman," jelas Kharis.

Namun, tambah politisi asal dapil Jawa Tengah itu, koordinasi diantara kedua Menteri itu, harus dipantau pelaksanaannya, agar dipastikan terimplementasi hingga ke daerah. Ia berharap, UNBK dapat berjalan lancar, dan tanpa ada harapan berarti.

Senada dengan Abdul Kharis, anggota Komisi X DPR Ferry Kase (F-Hanura) juga

mendorong Kemendikbud agar segera berkoordinasi secara horisontal kepada Menteri BUMN, supaya pemadaman listrik ini tidak terjadi pada saat UNBK berlangsung.

"Ini program nasional yang harus diamankan dengan baik. Karena ini menyangkut masa depan anak-anak bangsa. Jangan karena gara-gara permasalahan pemadaman listrik, merusak pelaksanaan UNBK," imbuh politisi asal dapil NTT itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong, Hermin Matandung mengatakan, SMK Negeri 1 Sorong dan SMA Negeri 3 Sorong merupakan dua dari lima sekolah yang akan menyelenggarakan UNBK di Kota Sorong.

Selanjutnya, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sorong, Walalayo Nicolas menjelaskan, pihaknya telah memenuhi persyaratan dari pusat untuk melaksanakan UNBK.

Sebagai bagian dari persiapan, pekan depan pihaknya akan melakukan simulasi terakhir sebelum UNBK.

Kunjungan kerja ini juga diikuti oleh Anggota Komisi X DPR, diantaranya Wiryanti Sukamdani (F-PDI Perjuangan), dan Bambang Sutrisno (F-PG). Dari F-Gerindra ada Nuroji, Dwita Ria Gunadi, Sri Meliyana, kemudian F-PAN diwakili Laila Istiana dan Yayuk Basuki. Berikutnya Lathifah Shohib dan Krisna Mukti dari F-PKB, dan Elviana (F-PPP).

(sf,nt) foto : sofyan/hr



SEGENAP PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
dan SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

**TURUT BERDUKA CITA**  
yang sedalam-dalamnya atas wafatnya



**ADJI FARIDA PADMO ARDANS**

ANGGOTA KOMISI VII DPR FRAKSI DEMOKRAT

Lahir di Tenggara 1 Oktober 1939. Wafat pada hari selasa, 22 Maret 2016  
Pukul 02.00 WIB, di Rumah Duka II, Kenanga Nomor 2A Cilandak Timur  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Semoga amal ibadahnya diterima Allah SWT  
dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan iman dan ketabahan

Serikat.

Istri mantan Gubernur Kalimantan Timur HM Ardans ini rencananya akan dimakamkan di tanah kelahirannya yakni Tenggara, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada hari ini, pukul 13.20 WITA.

Sebagaimana diketahui, Farida Ardans adalah legislator yang dilantik pada 15 Desember 2015 periode 2014-2019 sebagai

Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Noorbaiti Isran Noor yang mengundurkan diri karena mengikuti Pilkada Serentak 2015.

Sepanjang hidupnya, Farida yang juga sebagai anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR ini banyak mengabdikan dirinya ke berbagai organisasi dan instansi, diantaranya pernah tercatat sebagai Ketua Dharma Wanita, dan penyiar Radio Republik Indonesia (RRI).

(hs) foto: dev/hr



## Paripurna DPR Sahkan Anggota Dewas LPP RRI

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui lima nama calon Dewan Pengawas (Dewas) Radio Republik Indonesia (RRI) periode 2015-2021 pada Kamis, (17/03) di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

"Apakah laporan Komisi I DPR mengenai Calon Anggota Dewas RRI dapat disetujui?" tanya Taufik Kurniawan (F-PAN) yang bertindak sebagai ketua rapat. "Setuju.." jawab seluruh anggota yang hadir.

Sebagaimana yang tertuang dalam keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR pada tanggal 7 Desember 2015, Komisi I ditugaskan untuk menangani pemilihan anggota Dewas LPP RRI melalui uji kelayakan dan kepatutan. Untuk itu Komisi I melaksanakan tugasnya dengan mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, PP Nomor 12 Tahun 2015 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang tata Tertib.

Dalam paparannya, Wakil Ketua Komisi I Meutya Viada Hafid (F-Golkar) menyampaikan bahwa Komisi I telah menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon anggota Dewas RRI pada 22-24 Februari 2016 serta menetapkan 5 calon Dewas melalui Rapat Intern yakni: Mistam (Unsur RRI), Frederik Ndolu (Unsur Masyarakat), Hasto Kuncoro (Unsur RRI), Tantri Relatami (Unsur Pemerintah) dan Rosarita Niken Widiastuti (Unsur RRI).

Meskipun begitu, Komisi I DPR pada tanggal 15 Maret 2016 telah menerima surat pengunduran diri dari Calon Anggota Dewas yakni Rosarita Niken Widiastuti yang telah dilantik menjadi Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 14 Maret 2016.

"Menanggapi hal ini, Komisi I DPR pada tanggal 15 Maret 2016 telah mengadakan



*Suasana Disahkannya Anggota Dewas LPP RRI*

Rapat Intern untuk membahas surat tersebut dan memutuskan mengganti Rosarita Niken Widiastuti dengan Dwi Hernuningsih yang berasal dari unsur yang sama yakni unsur RRI," ujar Meutya.

"Keputusan Rapat Intern Komisi I ini merujuk pada Pasal 20 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang menyatakan bahwa salah satu persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewas adalah WNI yang tidak memiliki jabatan rangkap,"

sambungannya.

Dengan demikian 5 Calon Dewas LPP RRI yang disetujui Paripurna adalah Mistam (Unsur RRI), Frederik Ndolu (Unsur Masyarakat), Hasto Kuncoro (Unsur RRI), Tantri Relatami (Unsur Pemerintah) dan Dwi Hernuningsih (Unsur RRI).

Anggota DPR dapil Sumatera Utara I ini juga berharap bahwa Anggota Dewas yang telah disahkan dapat mengemban amanah dengan kualitas dan tanggung jawab. "Kami berharap Anggota Dewas yang telah disetujui dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa

tanggung jawab untuk menjadikan RRI sebagai Radio Publik yang berkualitas, sehingga menjadi Radio kebanggaan Bangsa Indonesia," harap Meutya.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Anggota Dewas LPP RRI periode 2010-2015 yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik selama 5 tahun dan kami mengharapkan kiranya anggota Dewas LPP RRI yang baru dapat melanjutkan serta meningkatkan pelaksanaan tugas di masa yang akan datang," papar Meutya.

(hs.mp) Foto: tim parip/ri

## Endang Srikarti Gelar Pasar Murah di Tiga Desa

Anggota DPR RI Endang Srikarti Handayani menggelar pasar murah di tiga desa di Klaten dan Sukoharjo, Jawa Tengah. Ini dijadikan momentum untuk memberdayakan masyarakat sekaligus mendengar aspirasi rakyat kecil.

Sepanjang Sabtu-Minggu (19-20/3), masyarakat di tiga desa memanfaatkan pasar murah untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga yang sangat terjangkau. Ketiga desa itu adalah

Desa Munggun dan Pusung di Klaten, serta Desa Karanganyar di Sukoharjo. Masyarakat di tiga desa tersebut menyambut antusias kehadiran pasar murah ini.

Endang yang kebetulan berasal dari dapil Jateng V (Solo, Sukoharjo, Boyolali, Klaten) ini, membagikan 4000 ribu paket sembako murah ke tiga desa yang dikunjunginya. Setiap paket sembako itu berisikan 5 kg beras, 1 kg gula, dan 2 liter minyak goreng seharga Rp 40 ribu. Harga tersebut jauh di bawah harga



# Sutan Adil: Kita Harus Perang Melawan Narkoba

**W**akil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra menegaskan kepada seluruh lapisan masyarakat, agar berperang melawan peredaran narkoba. Pasalnya, peredaran narkoba ini sudah menjadi ancaman serius bagi kehidupan bangsa.

Demikian dikatakan Sutan, usai mendampingi Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon (F-Gerindra) menerima sejumlah perwakilan civitas akademika Perguruan Tinggi dan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang tergabung dalam Asosiasi Relawan Perguruan Tinggi Anti Penyalahgunaan Narkoba (Artipena), di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/3/2016).

"Narkoba telah menjadi ancaman yang sangat serius. Karena ini yang akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan kita di masa mendatang. Kita harus sangat serius, dan harus perang melawan narkoba," tegas Sutan.

Politisi F-Gerindra ini mengapresiasi kehadiran Artipena yang bersinergi dengan BNN, yang diharapkan dapat mengawal mahasiswa di Perguruan Tinggi, agar tidak terlihat dalam dunia gelap narkoba.

"Begitu mahasiswa sudah masuk ke jenjang Perguruan Tinggi, tentu perlu pembinaan. Perlu dilakukan sesuatu langkah

agar mereka menyadari bahwa narkoba merupakan musuh terbesarnya. Tapi ini bukan hanya tugas komponen di Perguruan Tinggi saja, tapi seluruh lapisan masyarakat," tegas Sutan.

Untuk itu, politisi asal dapil Jambi itu akan senantiasa mendukung kegiatan Artipena, termasuk rencana gelaran Rakernas Artipena di Kendari, Sulawesi Tenggara, pada pertengahan April mendatang. Ia juga akan mengajak mitra Komisi X DPR, untuk memberi dukungan, baik dari sisi regulasi maupun anggaran.

"Saya akan memberi dukungan secara regulasi, dan mendorong alokasi anggaran, sehingga pergerakan organisasi relawan yang ditangani para professional yang ikhlas ini, dapat berjalan hingga ke daerah-daerah. Saya memberi apresiasi kepada Artipena, karena telah menghadirkan solusi dari masalah peredaran narkoba," tutup Sutan.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Lingkungan Pendidikan Badan Narkotika Nasional (BNN), Sulastiana mengatakan, Perguruan Tinggi merupakan

*stakeholder* penanganan darurat narkoba di Indonesia. Mengingat, sekian persen penyalahguna narkoba itu ada di Perguruan Tinggi.

"Tidak terlepas dari mahasiswa saja, orientasi dari penanganan masalah narkoba di kampus. Seluruh komponen kampus juga dengan mudah terjangkau penyalahgunaan narkoba," kata Ana, panggilan akrab Sulastiana.

Dalam konteks Tridarma Perguruan Tinggi, tambah Ana, kampus dapat melakukan kegiatan program penelitian, pendidikan, pengabdian masyarakat, termasuk dalam kurikulum, untuk melakukan pemberantasan narkoba.

"Dengan adanya Artipena ini, yang merupakan asosiasi pertama dari Perguruan Tinggi, ini akan dapat menggerakkan semua program dan kegiatan Pemberantasan Penggunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)," jelas Ana.

(sf) foto: jalea/hr.



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra



Anggota Komisi VI DPR RI Endang Srikarti gelar pasar murah

pasar yang terus melambung tinggi.

Selain pasar murah, ada juga pengobatan gratis bagi masyarakat setempat. Politisi Golkar ini menggandeng BNI 46 dan PT. Phapros untuk pengadaan sembako dan obat-obatan. Lewat pasar murah ini, Endang mengaku ingin selalu berdialog dan mendengar langsung keluh kesah masyarakat di dapilnya.

"Pasar murah ini justru untuk mengangkat martabat masyarakat tetap terjaga. Mereka sengaja tidak dimanjakan dengan pemberian gratis

atau hanya menunggu bantuan. Di sinilah letak pemberdayaan masyarakat itu sendiri," ucap Endang kepada Parlemen.

Pasar murah dan pengobatan gratis ini sekaligus menjadi bukti kepedulian anggota Komisi VI DPR pada masyarakat di dapilnya. Beberapa warga yang berhasil ditemui mengatakan, sangat senang bisa mendapatkan sembako dengan harga murah.

Purwanti warga Desa Pusung, mengaku mendapat diskon sembako yang luar biasa. Bila pergi ke pasar, uang Rp40 ribu biasanya ia hanya mendapat 1-2 item saja. Tapi, di pasar murah ini bisa mendapat 3 item.

(mh) foto: husen/hr.



## DPR dan Pemerintah Komitmen Percepat Pembahasan RUU

DPR dan Pemerintah telah berkomitmen untuk mempercepat proses pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) yang menjadi Prioritas pada tahun 2016. Kesepakatan bersama ini dilakukan dalam Rapat Konsultasi antara Presiden dengan Pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi, Pimpinan Badan Legislasi, Pimpinan Komisi I, Komisi III, dan Komisi XI, pada Februari 2016 lalu.



Ketua DPR RI Ade Komarudin

Untuk itu, Pimpinan DPR mengingatkan kepada seluruh Anggota DPR, agar dapat mematuhi ketentuan kehadiran secara fisik, baik dalam rapat-rapat Alat Kelengkapan DPR maupun dalam Rapat Paripurna DPR," pesan Ketua DPR RI Ade Komarudin saat membacakan pidato Penutupan Masa Persidangan III, Tahun Sidang 2015-2016, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (17/3/2016).

Akom, panggilan orang nomor 1 di DPR itu, DPR bersama Pemerintah telah menerapkan 40 RUU Prolegnas untuk Prioritas Tahun 2016, dan 5 RUU Kumulatif Terbuka, serta penambahan 9 RUU dalam Prolegnas RUU Tahun 2015-2019, yang semula berjumlah 160 menjadi 169 RUU.

DPR dan Pemerintah, masih kata Akom, juga telah menyetujui 6 RUU menjadi undang-undang, yang terdiri dari 4 RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2016 dan

2 RUU Kumulatif Terbuka. Keempat RUU itu yakni RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, RUU tentang Pencegahan dan

Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK), dan RUU tentang Penyandang Disabilitas.

"DPR dan Pemerintah menyakini bahwa RUU Tapera memiliki ide atau gagasan besar untuk menyelesaikan masalah perumahan, utamanya untuk membantu warga masyarakat yang belum memiliki rumah dan berpenghasilan rendah (MBR). RUU ini bersifat fenomenal karena memberikan solusi yang efektif dan revolutif, serta berkelanjutan yang akan menjadi pijakan hukum bagi bangsa Indonesia dalam menyediakan rumah murah, layak, dan terjangkau," jelas politisi F-PG itu.

Sementara tujuan disahkannya RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan

usaha; memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan, menumbuh kembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha, melindungi diri dari risiko bencana alam, perubahan iklim, pencemaran, dan memberikan jaminan keselamatan, serta bantuan hukum.

"Kemudian RUU tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK), yang semula berjudul RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, akan menjadi landasan hukum bagi skema asuransi simpanan, mekanisme pemberian fasilitas pembiayaan darurat oleh bank sentral (lender of last resort), serta kebijakan pencegahan dan penyelesaian krisis," papar Akom.

Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sehingga sektor

## Kepercayaan Publik Terhadap Kejati Perlu Ditingkatkan

Komisi III DPR RI mengapresiasi strategi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam melakukan terobosan-terobosan guna membangun dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan.

Menurut Anggota Komisi III Jazuli Juwaini, terobosan itu perlu dilakukan karena kita tahu kepercayaan publik kepada kejaksaan menurun.

"Sesungguhnya yang dilakukan Kejaksaan cukup banyak yang positif, tetapi ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan yaitu objektivitas dan profesional dalam penegakan hukum," ujar politisi F-PKS, saat melakukan kunjungan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Bandung Selasa (22/03/2016).

Menurut Jazuli kalau ingin memperbaiki kinerja mereka juga harus



keuangan dapat berfungsi secara normal dan memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi yang berkesinambungan.

Dan yang terakhir, tambah politisi asal dapil Jawa Barat ini adalah RUU tentang Penyandang Disabilitas. RUU ini berparadigma pada pemenuhan hak penyandang disabilitas, baik hak ekonomi, politik, sosial maupun budaya.

"Hal ini selaras dengan konstitusi kita yang menekankan pemenuhan terhadap hak setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Melalui RUU ini, diharapkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi dapat segera terwujud," imbuh Akom.

Sementara, dua RUU Kumulatif Terbuka yang telah disahkan dalam Rapat

Pariurna, pertama, RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China tentang Kerja Sama Akitivitas Bidang Pertahanan; dan kedua, RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

"Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota DPR di Komisi I, Komisi IV, Komisi III, dan Komisi XI serta Pansus yang telah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut di atas. Terima kasih juga kepada Pimpinan Fraksi-Fraksi dan Sekretariat Jenderal beserta seluruh jajarannya atas kerja samanya. Mengingat pentingnya RUU-

RUU tersebut, diharapkan kepada para Anggota DPR dapat memanfaatkan kegiatan kunjungan kerja sekaligus untuk mensosialisasikan RUU-RUU yang baru disahkan dimaksud," harap Akom.

Akom menambahkan, DPR juga telah memutuskan untuk mengajukan RUU Usul DPR untuk dibahas bersama dengan Pemerintah, yaitu: RUU tentang Kewirausahaan Nasional; RUU tentang Pertanahan; dan RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan serta RUU tentang Arsitek.

"Kami informasikan juga bahwa sebanyak 14 RUU sampai saat ini masih dalam proses pembahasan antara DPR dan Pemerintah. Sementara sepuluh RUU dalam tahap penyusunan oleh DPR," tutup Akom.

(sf.ann), foto: tim parle/hr.



Anggota Komisi III DPR RI Jazuli Juwaini.

membuat *reward and punishment* dengan baik.

"Karena ada orang yang terkadang semangatnya hanya menghukum sementara memberi penghargaan lemah. Padahal jika *punishment* dan *reward* balance orang akan terpacu, orang akan berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik," tuturnya.

Pemerintah, terang Jazuli, harus membuka mata secara objektif, untuk memberikan anggaran yang seimbang antar anggaran KPK, Kepolisian dalam menghadapi suatu persoalan.

"Jangan hanya satu instansi yang anggarannya begitu tinggi sementara

tuntutan sama. Dalam hal ini Bapennas dan Menteri Keuangan harus memperhatikan agar mereka bisa menyelesaikan permasalahan tanpa bingung memikirkan anggaran," tegasnya.

Untuk itu, Jazuli mengharapkan, tidak hanya Kejati di Jabar saja yang melakukan

terobosan untuk membangun kepercayaan masyarakat tetapi juga di seluruh Indonesia bahkan mulai dari Kejaksaan Agung.

Ditempat yang sama, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Feri Wibisono menjelaskan, pencapaian target kinerja di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk Tahun Anggaran 2015 berjalan optimal, dengan penyerapan anggaran sebesar 85 persen. "Kendala tidak terserapnya anggaran salah satunya karena jumlah perkara melampaui anggaran,"paparnya.

Mengenai terobosan guna membangun kepercayaan masyarakat yang dilakukan Kejati Jawa Barat, terang Feri, salah satunya dengan mengelola partisipan

masyarakat, penguatan petunjuk teknis operasional, penguatan SDM Jaksa dan mutasi lokal, pencegahan penyimpangan dan pola operasional penanganan perkara dan pendukung.

Sekedar informasi, dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, Tim Kunker Komisi III DPR ke Provinsi Jawa Barat ingin mengetahui sejauh mana Realisasi Anggaran tahun 2015 mitra kerjanya, Strategi Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Supervisi dan Pengambil alihan Perkara TPK oleh KPK, Perkara yang Menonjol di Wilayah Jawa Barat dan Tantangan Permasalahan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kejaksaan.

Rombongan Tim Kunker Komisi III kali ini di pimpin oleh Wakil ketua Komisi III Benny K. Harman, dan anggota tim yang hadir yaitu Adies Kadir (F-Golkar), Wihadi Wiyanto ( F-Gerindra), Didik Muktianto ( F-Demokrat), Daeng Muhammad ( F-PAN), IR. Tjatur Supto Edy (F-PAN), Bahrudin Nasori (F-PKB), Jazuli Juwaini (F-PKS), Taufiqulhadi (F-Nasdem) dan Aboe Bakar Al-Habsyi (F-PKS).

(rmm,nt) foto:ria/hr.



## Darizal Basir Sampaikan Bela Sungkawa Jatuhnya Heli TNI AD di Poso

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Darizal Basir, menyampaikan bela sungkawa terkait musibah jatuhnya Helikopter TNI Bell 412 di Poso. "Saya menyampaikan duka cita mendalam atas musibah jatuhnya Helikopter TNI di Poso yang menyebabkan gugurnya prajurit-prajurit TNI saat melaksanakan tugas negara".

Seperti diberitakan, Helikopter TNI AD jenis Bell 412 EP dengan nomor HA 5171 jatuh di Poso, Sulawesi Tengah pada Minggu malam (20/4/2016). Heli tersebut mengangkut 13 penumpang dan kru. Turut dalam penumpang itu adalah Kolonel Saiful, Danrem 132/Todilaku. 12 orang tewas sementara 1 belum ditemukan. Kolonel Saiful termasuk yang dipastikan sebagai korban tewas.

Sebelumnya, helikopter tersebut terbang dari desa Napu menuju Poso untuk melaksanakan tugas operasi perbantuan kepada Polri di Poso Pesisir Selatan, Sulawesi Tengah. "Tugas Perbantuan itu adalah salah satu tugas Operasi Militer selain Perang" jelas Darizal Basir.

Sebagaimana disebutkan dalam UU TNI No.34/2004, tugas TNI terbagi dalam dua, yaitu Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). "Tugas perbantuan kepada Polri dalam rangka penegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah salah satu OMSP tersebut", terang Politisi asal Sumbar.

Darizal Basir meminta agar pemerintah memberikan perhatian dan perlakuan yang layak kepada para korban. "Mereka adalah para pahlawan karena gugur saat menjalankan tugas negara". Selain kepada para korban, Darizal juga meminta pemerintah agar memperhatikan dan menjamin nasib keluarga-keluarga yang ditinggalkannya.

Diluar itu, Darizal yang juga mantan

prajurit TNI AD ini mendesak agar Mabes TNI segera melakukan investigasi mendalam atas musibah ini. Diberitakan diberbagai media bahwa musibah terjadi karena faktor cuaca. "Setahu saya, Heli jenis Bell 412 EP adalah termasuk jenis helikopter canggih, diklaim mampu beroperasi dalam cuaca ekstrem sekalipun".

Pesawat ini diproduksi di Kanada dan digunakan oleh banyak militer di dunia, termasuk Amerika, Inggris, Norwegia, Belanda dan Korea Selatan. TNI membeli pesawat ini dalam kondisi baru tahun 2012. Berdasar catatan yang dimiliki Darizal, hingga Oktober 2015 TNI telah memiliki 16 unit Helikopter Bell 412. Jumlah tersebut sesuai dengan target yang hendak dimiliki. "Kalau memang kecelakaan terjadi karena faktor cuaca, kita harus sampaikan komplain kepada industri pesawat ini".

Ditanya lebih dalam kemungkinan penyebab terjadinya kecelakaan seperti *human error*, Darizal enggan berspekulasi. "Kita tidak boleh menduga-duga. Percayakan kepada Mabes TNI untuk melakukan investigasi". Namun, belajar dari tragedi ini, Darizal minta agar dalam pemenuhan alutsista ke depan, khususnya dalam program Minimum Essential Forces tahap II, seluruh alutsista yang hendak dimiliki harus benar-benar sesuai dengan kondisi alam Indonesia. "Tidak selalu alutsista yang canggih dan handal di Eropa dapat digunakan di Indonesia. Perbedaan iklim akan sangat berpengaruh," tandas Darizal.



Anggota Komisi I DPR RI Darizal Basir

(tt) foto: andri/hr.

## Kalteng Bangun Skat Bakar untuk Antisipasi Kebakaran Hutan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) sedang membangun skat bakar di areal hutan untuk antisipasi kebakaran hutan. Skat ini berupa kanal-kanal air di pinggiran dan di tengah hutan.

Tim kunjungan kerja Komisi IV DPR RI sempat melihat langsung areal lahan gambut yang terbakar di sekitar Jembatan Nusa, Kabupaten Pulang

Pisau, Kalteng, Selasa (22/3). Ketua Komisi IV Edhy Prabowo yang memimpin tim ini menyambut baik langkah antisipasi untuk mencegah kebakaran hutan terulang lagi.

"Anggaran untuk mencegah lebih murah daripada menanggulangi kebakaran. Saya minta kalau bisa pembangunan skat bakar ini jangan seadanya, karena lahannya sangat luas. Dan Kabupaten Pulang Pisau merupakan

daerah yang paling kritis. Kita dukung upaya ini termasuk anggarannya, ujar Edhy usai menyaksikan lahan yang terbakar.

Sementara pejabat Gubernur Kalteng Hadi Prabowo dalam pertemuannya di kantor gubernur, mengungkapkan, peta rawan kebakaran hutan di Kalteng mencapai 3,7 juta hektar. 12 ribu hektar diantaranya sudah terbakar. Namun, dari pantauan satelit ada 40 ribu hektar yang



# UU Penyandang Disabilitas Wujudkan Kesamaan Kesempatan

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyandang Disabilitas yang merupakan revisi dari UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI.

**K**etua Komisi VIII DPR Saleh Partaon Daulay menjelaskan bahwa arah pengaturan UU tentang Penyandang Disabilitas adalah untuk mewujudkan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas, sehingga dapat menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan Negara dan masyarakat.

"Pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas perlu diprioritaskan dalam struktur pengambil kebijakan oleh aparatur negara," kata Saleh, politisi Partai Amanat Nasional dapil Sumatera Utara II, dalam Sidang Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Kamis (17/3/2016).

Sejak tanggal 20 Januari 2016, Komisi VIII bersama Pemerintah telah melakukan pembahasan RUU ini secara intensif dan dinamis. Menurutnya, ada dua yang sangat krusial, yaitu pertama pemberian insentif kepada pemberi kerja dan badan usaha yang membuka dan menerima pekerja penyandang disabilitas.

"Insentif yang diberikan dapat berupa kemudahan perizinan usaha, pemberian penghargaan, dan bantuan modal usaha," ungkapnya.

Hal krusial berikutnya, adalah pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND), yang menjadi tuntutan dari para penyandang disabilitas selama ini. Besar harapan DPR agar setelah RUU ini disahkan menjadi undang-undang, Pemerintah segera melakukan sosialisasi serta menyusun beberapa peraturan pelaksanaannya, agar undang-undang ini segera berlaku efektif.

Anggota Komisi VIII Maman Imanul Haq mengatakan akan meminta Kementerian Sosial RI agar segera membuat aturan turunannya. "Implementasi UU ini betul-betul terealisasi dengan baik, sehingga penyandang disabilitas mendapatkan haknya sebagai warga Negara," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa dapil Jawa Barat IX ini.

Selanjutnya, DPR dalam hal ini Komisi VIII akan melakukan pengawasan, sampai



Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaon Daulay membacakan laporan pembahasan RUU Disabilitas

sejauh mana gedung-gedung, fasilitas umum itu menyediakan layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas. "Kita ingin bahwa undang-undang ini tidak hanya diketok, semua lapisan masyarakat dan instansi Pemerintah harus betul-betul mengimplementasikan UU ini," paparnya.

Selain itu, Komisi VIII juga akan melihat mengenai kemudahan permodalan, dan perusahaan-perusahaan yang akan mengikutsertakan penyandang disabilitas ini. Termasuk pembentukan KND yang juga dipandang sangat penting.

(as) Foto: tim parile/hr



Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo

sudah terbakar.

Pemprov Kalteng sendiri sudah menggiatkan patroli hutan yang digalang oleh Polda setempat. Kebiasaan masyarakat Kalteng, ungkap gubernur, selalu membakar untuk membuka lahan. Ini sudah jadi tradisi turun temurun, karena biayanya sangat murah.

Komisi IV, kata Edhy, ingin mengetahui pula seberapa banyak target pembangunan skat bakar itu oleh Pemerintah Pulang Pisau. Dari situ akan terlihat kebutuhan anggarannya. Dan

Komisi IV siap membantu merealisasikan anggaran untuk itu.

"Dari situ juga akan terlihat berapa kemampuan pusat dalam mengalokasikan anggaran pembangunan skat bakar. Ini langkah preventif sebelum terjadi kebakaran. Kita berharap, ke depan yang selalu dilakukan adalah pencegahan bukan lagi penanggulangan kebakaran hutan," papar Edhy.

(mh) Foto: husein/hr



## Komisi V DPR Dorong Haluoleo Jadi Bandara Alternatif

Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena bersama anggota Komisi V lainnya mendorong pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana Bandar Udara Haluoleo agar menjadi bandara alternatif Sultan Hasanuddin, dan pemerintah setempat pun juga memprogramkan untuk memperpanjang landas pacu pesawat (*runway*).

"Dulu, pada masa Presiden SBY jarang transit ke Sulawesi Selatan, sebab jika itu dilakukan akan banyak pesawat reguler yang *delay*. Sehingga langkah ini perlu diambil untuk mengantisipasi jika Bandara Hasanuddin Makassar mengalami kepadatan," kata Michael Wattimena (F-P Demokrat) saat melakukan kunjungan kerja ke Bandar Udara Haluoleo, Kendari, Senin (21/03).

Sejauh ini, jumlah *manifest* yang ada di Bandara Haluoleo Kendari dalam sehari



Tim Kunker Komisi V DPR RI Tinjau Bandar Udara Haluoleo

rata-rata mencapai 1000 lebih penumpang berangkat maupun tiba dengan frekuensi penerbangan 32 kali tiba-berangkat dalam sehari. Dimana jumlah *manifest* ditafsir akan meningkat seiring dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan di Sulawesi Tenggara.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam megemukakan program Pemerintah Sultra untuk

melakukan pembenahan infrastruktur jaringan nasional. Termasuk Bandara Haluoleo dengan memperpanjang *runway* dari 2.500 meter menjadi 3.000 meter.

Menurutnya, sudah menjadi tuntutan untuk bandar udara dengan standarisasi pelayanan nasional agar fasilitas bandar udara bisa ditingkatkan. Demikian juga dengan perpanjangan *runway* dan rekonstruksi *taxiway* Haluoleo agar dilakukan secara menyeluruh sehingga bisa maksimal.

"Pembangunannya jangan dicicil-cicil, misalnya membangun *runway*, itu kan satu sarana yang harus disiapkan agar penerbangan utamanya saat *take off* maupun *landing* dalam keadaan nyaman. Bandara kami itu, karena disambung-sambung setiap tahun, kadang dapat 100 meter, kadang dapat 200 meter. Otomatis pemadatan bangunan demikian juga elevasi permukaan *runway* terdapat *gap* yang akhirnya membuat pendaratan itu menjadi sangat tidak nyaman dan nanti bisa berakibat terjadi kerawanan pada proses pendaratan maupun *take off*," jelas Nur Alam.

(ann,nt) foto:anne/hr.

## Komisi X Takjub Kesultanan Ternate, Jadi Masukan RUU Kebudayaan

Tim Komisi X DPR sangat takjub atas tata kelola Kesultanan Ternate yang terus dipertahankan hingga kini. Ketua Tim Kunker Komisi X Isma Yatun mengungkapkan hal itu ketika mengunjungi Kesultanan Ternate Senin (21/3) sore diterima jajaran Kesultanan dipimpin Perdana Menteri Mahmudi Zulkiram.

Kepada Tim Komisi X PM Zulkiram menjelaskan bahwa kesultanan sangat menjaga budaya leluhur, tidak mengangkat langsung sultan dari putera mahkota sehingga pemilihan sultan sangat demokratis. Selain itu memiliki pasukan keamanan, Kapita Laut semacam Panglima ABRI dan Tuli Lamo (Sekretaris Negara).

Yang lebih menakjubkan semua perangkat kesultanan tidak digaji lillahi ta'ala." Mereka datang kesini dengan biaya

sendiri kadang juga cari makan ke warung," kata Zulkiram.

Mendengar penjelasan ini para anggota Komisi X terkesima dan memuji kesultanan Ternate yang menjunjung tinggi adat leluhur. Yang juga membuat decak kagum para anggota Dewan bahwa Kesultanan Ternate lebih dulu berdiri sebelum NKRI. Anggota tim Komisi X Nur Hasan Zaidi menuturkan, tata kelola pemerintahan Kesultanan Ternate telah menginspirasi lahirnya Pancasila.

"Dari sinilah demokrasi berasal dan Pancasila terinspirasi sehingga kita semua bisa menikmati tata kelola negara yang baik," ungkap Isma Yatun. Dia berharap perangkat adat tetap semangat melestarikan kesultanan yang dan



Ketua Tim Kunker Komisi X DPR RI Isma Yatun memberikan cenderamata dengan PM Kesultanan Ternate

masukannya ini menjadi tambahan bekal pembahasan RUU Kebudayaan.

Dalam Masa Persidangan IV tahun 2015/2016 awal April mendatang, Komisi X bersama Pemerintah akan melakukan pembahasan Tingkat I RUU Kebudayaan dan RUU Sistem Perbukuan.

(imp) foto:Mastur/hr.



Komisi VIII DPR RI Kunler ke Jambi Tinjau Tanggul pemecah ombak

## Komisi VIII DPR Tinjau Tanggul Pemecah Ombak

**K**omisi VIII DPR RI dalam rangka reses masa sidang ini melakukan kunjungan kerja ke Bintan, dalam kunjungannya komisi VIII DPR RI meninjau Tanggul Pemecah Ombak Sepanjang 550 meter di Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan.

Tanggul sepanjang 550 meter tersebut dibangun karena sebelumnya pada tahun 2009 mengalami abrasi pantai, juga ketika musim pasang utara air laut naik dan menutup akses jalan di daerah tersebut.

Mengantisipasi pasang utara air laut tersebut BNPB bekerjasama dengan BPBD membangun tanggul tersebut. Pasang surut air laut di pesisir kawasan pantai Trikora, Kabupaten Bintan juga berpotensi terjadinya abrasi lebih dalam, untuk itu tanggul tersebut dibangun.

Jika tak cepat diantisipasi, tak hanya pemukiman warga di sepanjang pesisir yang merasakan dampak kerugiannya, namun juga industri pariwisata setempat. Kondisi itu menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI saat menyambangi Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Minggu (20/3/2016) siang.

Wakil ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amalia, mengatakan, kedatangan mereka ke Bintan juga untuk meninjau kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pusat di daerah.

"Ini upaya kita melihat sejauh mana kinerja BNPB yang bersinergi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Bintan. Juga ingin melihat apakah bantuan penanggulangan yang diberikan pusat disalurkan dan di gunakan dengan baik untuk

penanggulangan bencana selama ini," ujar Ledia Hanifa Amalia .

Menurut Ledia, perlu melihat langsung kinerja kedua Badan sebab ada beberapa kasus mereka dapati di daerah, penanggulangan bencana kurang mendapat perhatian badan tersebut.

Semisal, siklus banjir tahunan yang terjadi di Kepulauan Bangka Belitung, banjir bandang yang melanda daerah tersebut tak diantisipasi serius oleh badan penanggulangan bencana daerah tersebut. "Untuk itu perlu adanya sinergi antar lembaga terkait dan pemerintah daerah mengantisipasi supaya hal tersebut tidak terulang dan jangan sampai merugikan masyarakat," tegas Ledia.

(ndri,nt), foto : andri/hr.



# BERITA BERGAMBAR



Suasana konferensi pers yang digelar Ketua DPR RI Ade Komarudin di Gedung Nusantara III Selasa, 22/03/2016. foto : arief/hr



Ketua DPR RI Ade Komarudin saat menggelar konferensi pers mengenai usulan perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara, di Gedung Nusantara III, Selasa, 22/03/2016. foto : arief/hr



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berkunjung ke Perpustakaan Bank Indonesia. Rabu, 23/03/2016 foto : kresno/hr



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berjabat tangan dengan Deputy Gubernur Bank Indonesia dan Ketua BI Institute dalam kunjungannya ke Perpustakaan BI. Rabu, 23/03/2016 foto : kresno/hr



Tim Kunker Komisi X DPR RI dipimpin Sutan Adil Hendra mengunjungi Benteng Malborough Bengkulu, Minggu 20/3/2016. foto: ray/hr



Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Polda Sulawesi Tengah. Selasa, 22/03/2016 foto: runi/hr

